



Pesantren dan Pengembangan Ekonomi dalam Perspektif *Maqashid Al-Shari'ah*

Saiful Jazil^{a)}, Muhammad Fahmi^{b)}, Senata Adi Prasetya^{c)}, Moh. Faizin^{d)}, Muh. Sholihuddin^{e)}

a) UIN Sunan Ampel Surabaya

b) UIN Sunan Ampel Surabaya

c) UIN Sunan Ampel Surabaya

d) UIN Sunan Ampel Surabaya

e) UIN Sunan Ampel Surabaya

ABSTRAK

Modernisasi yang menghasilkan proses diversifikasi peran sosial-ekonomi pesantren adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Oleh sebab itu, pesantren harus segera mengambil tindakan jika ingin mempertahankan peran dan fungsinya. Dalam konteks ini, artikel ini berupaya mendeskripsikan perluasan mandat (*widening mandate*) sebuah pesantren di Jember, yaitu Pesantren Nurul Qornain (PNQ), yang berkiprah – selain dalam hal pemberdayaan di bidang pendidikan – juga berperan dalam pengembangan usaha ekonomi. Hal ini kemudian ditinjau dalam perspektif *maqashid al-shari'ah* (tujuan shari'at). Melalui kajian kualitatif, artikel ini menjelaskan bahwa pengelolaan usaha ekonomi PNQ dilakukan dengan melibatkan alumni pesantren dan masyarakat lokal. Beberapa unit usaha yang dikembangkan bergerak di bidang pertanian, perdagangan, peternakan, perkebunan, pertambangan. Faktor utama yang melatari PNQ dalam mengelola usaha ekonomi adalah kemandirian pesantren. Gagasan kemandirian pesantren diinisiasi oleh kiai (pengasuh pesantren). Menurutnya, pesantren dapat berkembang pesat apabila mandiri dan berdaulat dalam segala hal. Kemandirian ini oleh pengasuh pesantren ditafsirkan dengan kemandirian ekonomi. Bagaimanapun, pengembangan ekonomi menjadi faktor determinan dalam menopang eksistensi pesantren itu sendiri. Kontribusi PNQ bagi pemberdayaan ekonomi dirasakan oleh pesantren, santri, alumni santri, dan masyarakat. Dalam perspektif *maqashid al-shari'ah*, pengembangan usaha ekonomi yang dilakukan PNQ sejalan dengan nilai *hifdhul maal* (pemeliharaan harta), dan ini bersifat prospektif jika dapat direplikasi oleh lembaga pendidikan Islam dewasa ini.

ABSTRACT

Modernization to deliver the process in diversifying the socio-economic role of *pesantren* is undeniable things. Consequently, *pesantren* must take immediate action if they want to maintain their role and function. In this context, this article wants to describe the widespread mandate of a *pesantren* in Jember, namely Pesantren Nurul Qornain (PNQ), those takes part –not only empowerment in the field of education- but also play role in the development of economic enterprises. This is then reviewed in the perspective of *maqashid al-shari'ah* (the purpose of shari'a). Throughout qualitative study, this article explains that *pesantren* alumni and local society involved in the management of PNQ economic enterprises. Some of developed business unit in the area of agriculture, trading, animal farm, plantation, and mining. Furthermore, the main factor behind PNQ in managing economic enterprises is *pesantren* sovereignty. It is initiated by *kiai* (the leader of *pesantren*). According to him, *pesantren* can develop rapidly if they sovereign in all aspects. This sovereignty is interpreted as economic sovereignty. However, economic development is as determining factor in supporting the existence of *pesantren*. Additionally, the development of economic enterprises carries out by PNQ in line with the value of *hifdhul maal* (the maintenance of property). Hence, it is prospective benefits if it can be replicated by Islamic educational institution nowadays.

KATA KUNCI

Pesantren NQ; Pengembangan Ekonomi; Maqashid al-Shari'ah

KEYWORDS

NQ pesantren; Economic Development; Maqashid al-Shari'ah

A. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri, pesantren memiliki rekam historis yang panjang dalam melakukan “kerja-kerja” pemberdayaan masyarakat.¹ Beberapa aspek pemberdayaan masyarakat tersebut di antaranya adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM), sosial-keagamaan, dan ekonomi. Kemunculan Nahdlatul Tujjar pada tahun 1918, misalnya, yang diinisiasi oleh kelompok tradisionalis pesantren merupakan bukti sejarah bahwa pondok pesantren sedari pendiriannya memang memiliki *concern* terhadap ekonomi umat.² Seperti yang diutarakan Fauzan Adhim, bahwa urgensi dan peran strategis pondok pesantren dalam konteks pengembangan ekonomi didasari pada enam faktor; *pertama*, kemajuan ekonomi pesantren bisa menjadi stimulus finansial kegiatan dan pengembangan pesantren; *kedua*, penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar; *ketiga*, menjadi ekosistem ekonomi kerakyatan berbasis syariah; *keempat*, memacu jiwa *entrepreneurship* santri; *kelima*, mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi mikro-menengah; dan *keenam*, menciptakan kemandirian lembaga dan mengurangi ketergantungan finansial eksternal.³

Pesantren saat ini dituntut untuk mampu – setidaknya – melakukan kerja-kerja pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, selain sebagai lembaga *tafaqquh fida din*.⁴ Tuntutan ini juga didukung oleh pemerintah dalam beberapa program. Melalui Kementerian Agama, misalnya, pemerintah telah berkomitmen untuk terus menggencarkan program kemandirian pesantren seperti yang diungkapkan Menag Yaqut Cholil Qoumas, “tahun ini ada 105 model kemandirian pesantren dan tahun 2024 nanti akan ada 5.000 pondok pesantren yang akan menjadi *role model* penguatan kemandirian ekonomi pesantren, kita akan berikan modal, pendampingan hingga manajemen pemasaran.”⁵ Kemudian, hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Tim *One Pesantren One Product* (OPOP) Jatim juga bertekad mewujudkan komitmen dalam pembangunan ekonomi berbasis pesantren. Hal ini dilakukan dalam bentuk sinergi program kegiatan yang tertuang melalui PAPBD 2020 dan APBD 2021. M. Ghofirin, mengatakan: “pondok pesantren di Jawa Timur hingga kini yang telah memiliki izin sebagaimana data dari Kemenag Jatim telah mencapai 4.600 pondok pesantren. Ini sebuah angka yang luar biasa besar dan diharapkan dapat menjadi media bersama dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Jatim melalui jalur atau basis pondok pesantren.”⁶

¹ Muhammad Nafik Hadiryandono, "Sosial Ekonomi Pondok Pesantren Perspektif Sejarah," *Mozaik Humaniora* 18.2 (2018): 189-204; Fauzan Adhim, "Ekosistem Pesantrenpreneur Berbasis Pengembangan Potensi Lokal." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 19.2 (2021): 127-140.

²Fikri Mahzumi, "Nahdlatul Tujjar, Meneropong NU-Kapital", *Majalah al-Fikrah* (2017).

³Fauzan Adhim, *Arah Baru Manajemen Pondok Pesantren* (Malang: Literasi Nusantara, 2020).

⁴A. Alhifni, et., al., "WAQF an instrument of community empowerment in Islamic Boarding School Daarut Tauhiid in Indonesia", *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 13, No. 2 (2017): 76–88.

⁵Kemenag, "Menag Ungkap Strategi Ungkit Kemandirian Pesantren", dalam <https://kemenag.go.id/read/menag-ungkap-strategi-ungkit-kemandirian-pesantren>, diakses 30 Januari 2022.

⁶OPOP Jatim, "Pemprov Jatim dan OPOP Bersinergi Wujudkan Penguatan Ekonomi Berbasis Pesantren", dalam <https://opop.jatimprov.go.id/detail/12/pemprov-jatim-dan-opop-bersinergi-wujudkan-penguatan-ekonomi-berbasis-pesantren>, diakses 30 Januari 2022.

Dengan demikian, selain sebagai lembaga pendidikan, tuntutan pesantren untuk dapat bertransformasi sebagai lembaga sosial-kemasyarakatan – termasuk penggerak ekonomi keumatan – menjadi suatu keniscayaan. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi telah menekan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.⁷ Tentu saja, kebijakan ini berimplikasi langsung terhadap tanggung jawab pemerintah untuk “turun gunung” membantu pesantren dalam menjalankan proses belajar mengajar. Selama ini, pesantren sudah eksis jauh pra-kemerdekaan Indonesia relatif mandiri dalam mencari sumber daya keuangan atau finansial. Oleh karena itu, afirmasi pemerintah terhadap pesantren dalam hal ini patut diapresiasi.

Pada mulanya, pesantren tidak memiliki kewajiban untuk berkomitmen membangun daerah tertinggal (semisal kemiskinan, keterbelakangan ekonomi, dan semacamnya), karena tujuan utamanya adalah sebagai lembaga pendidikan. Namun, karena Pesantren biasanya didirikan di kawasan pedesaan yang membentuk hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat.⁸ Hal ini tidak terlepas dari kelincuhan pesantren yang bersumber dari intelektual tradisional pesantren, penerapan integrasi ajaran dan nilai-nilai Islam di bidang sosial ekonomi. Kelincuhan pesantren merupakan episentrum kekuatan fungsi sosial ekonomi, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan melalui transformasi dan perluasan layanan kelembagaan pesantren.⁹ Baik kecil atau besar, sebuah Pesantren diyakini memberikan kontribusi finansial kepada masyarakat setempat, seperti dalam pembangunan ekonomi, pesantren telah menyumbangkan perannya dalam latihan keahlian, dalam memberikan lapangan pekerjaan, dalam menyumbangkan hasil pertanian, meramaikan perniagaan, menumbuhkan industri kecil, dan memberikan permodalan kepada masyarakat desa.¹⁰

Mendukung hal tersebut, beberapa karya ilmiah telah mengidentifikasi nilai-nilai Pesantren, seperti kontributor layanan sosial,¹¹ inisiator lokal nilai moral untuk lingkungan yang berkelanjutan¹² penemu untuk mewujudkan potensi ekonomi lokal,¹³ dan penghasil lulusan sekolah yang memiliki keterampilan vokasi.¹⁴ Selain itu, NU sejak pra-pendiriannya telah menginisiasi gerakan ekonomi

⁷Koran SINDO, "Dana Abadi Dorong Peran Kekinian Pesantren" dalam <https://nasional.sindonews.com/read/548276/15/dana-abadi-dorong-peran-kekinian-pesantren-1632323356>, (23 September 2021), diakses 30 Januari 2022.

⁸Syamsul Ma'arif, "Poja Hubungan Patron-Client Kiai dan Santri di Pesantren." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 15.02 (2010): 273-296

⁹R. Lukman Fauroni, and Mujahid Quraisy, "Pesantren Agility in Community Economic Development." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10.2 (2019): 155-168.

¹⁰Muhamad Mustari, and M. Taufiq Rahman, *Ekonomi Pesantren: Manajemen Pesantren dalam Pembangunan Masyarakat Desa* (Bekasi: Lintang Publishing, 2012).

¹¹Bambang Budiwiranto, "Pesantren and participatory development: the case of the Pesantren Maslakul Huda of Kajen, Pati, Central Java." *Journal of Indonesian Islam* 3.2 (2009): 267-296; M. Falikul Isbah, *Examining the Socio-Economic Role of Islamic Boarding Schools (Pesantren) in Indonesia* (Doctoral Dissertation, School of Humanities and Social Sciences University of New South Wales, Canberra, 2016); Scott Allen Buresh, *Pesantren-based development: Islam, education, and economic development in Indonesia* (University of Virginia, 2002).

¹²Herdis Herdiansyah, Trisasono Jokopitoyo, and Ahmad Munir, "Environmental awareness to realizing green Islamic boarding school (eco-pesantren) in Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 30. No. 1. IOP Publishing, 2016; Muhammad Nafik Hadiryandono, "Sosial Ekonomi Pondok Pesantren Perspektif Sejarah." *Mozaik Humaniora* 18.2 (2018): 189-204.

¹³Fauzan Adhim, "Ekosistem Pesantrenpreneur Berbasis Pengembangan Potensi Lokal." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 19.2 (2021): 127-140; Syamsul Hadi, "The Economy of Wellbeing in Beji: Pesantren and Entrepreneurship in Village Community." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 4.1 (2019): 94-102.

¹⁴Sufean Hussin, Mustari Mohamad, and Anahita Ghanad, "Education for emancipation and sustainability: the roles of Pesantrens in societal development in Java, Indonesia." *MOJEM: Malaysian Online Journal of Educational Management* 5.3 (2017): 1-18.

keumatan, yaitu Nahdlatut Tujjar, sebuah asosiasi pedagang atau saudagar dalam mengentaskan kemiskinan dan memakmurkan masyarakat. Dalam konteks ini pula, NU melakukan gerakan ekonomi sebagai *counter attack* praktik ekonomi kapitalis dan mencerahkan warganya yang masih berkubang dalam doktrin *tajrid* (menjauhi kehidupan dunia).¹⁵ Dalam penelitian serupa, Suwito, misalnya, meneliti bahwa munculnya bisnis ekonomi di pesantren didorong oleh kebutuhan mereka untuk (*survive*) bertahan hidup. Untuk itu, pesantren perlu menjalankan kegiatan ekonomi.¹⁶

Senada dengan itu, Idi Warsah,¹⁷ Hasbi Indra¹⁸ dan Arian Agung Prasetyawan¹⁹ juga mengemukakan bahwa saat ini pesantren telah menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat, bahkan beberapa pesantren memberdayakan perempuan untuk mendukung gerakan *women entrepreneurship*. Kajian-kajian ini belum begitu dikaitkan dengan perspektif *Maqasid al-Shari'ah*. Ada pula yang mengaitkannya dengan perspektif *maqashid al-shari'ah* seperti Fahmi Ali. Fahmi Ali mengatakan dalam temuannya bahwa pesantren cukup berperan aktif dalam memberdayakan ekonomi lokal dan masyarakat kurang mampu.²⁰ Selain itu, ia mengatakan, penelitiannya ini adalah studi pertama yang menyelaraskan teori pembangunan ekonomi lokal dan *Maqāsid al-Syar'ah* dan menyajikan bukti praktis dari sebuah Pesantren. Namun, kajian Fahmi Ali mengambil lokus penelitian pesantren di Jawa Barat.

Melengkapi yang sudah ada, artikel ini mengkaji perluasan mandat (*wider mandate*) pada sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Pesantren Nurul Qarnain (selanjutnya ditulis PNQ) Sukowono, Jember, Jawa Timur dalam perspektif *Maqashid al-Shari'ah*. Artikel ini berfokus pada tiga isu penting: Sejauh mana pesantren merupakan wahana yang efektif untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi di masyarakat sekitar? Apakah slogan "kemandirian" yang diusung pesantren mengubah struktur sosial masyarakat? Sejauh mana paradigma *maqashid al-shari'ah* yang diusung pesantren mendorong partisipasi dan kesejahteraan masyarakat serta mencapai taraf hidup yang layak? Untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas, maka penulis uraikan secara deskriptif-analitis pada bagian berikutnya.

B. Pesantren Nurul Qarnain dan Pengembangan Usaha Ekonomi

Pondok Pesantren Nurul Qarnain merupakan lembaga pendidikan Islam khas Nusantara yang berdiri pada tahun 1968 M di wilayah karesidenan Besuki, tepatnya di desa Baletbaru kecamatan

¹⁵Luthfi Hadi Aminuddin, and Isnatin Ulfah, *SPIRIT NAHDLATUT TUJJAR: Gerakan Sosial NU Membangun Ekonomi Syari'ah* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021).

¹⁶N. S. Suwito, "Model Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2008): 63-85.

¹⁷Idi Warsah, "Entrepreneurship Education in Pesantren: Strategies to Drive Students' Interest in Entrepreneurship," *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan* 18.2 (2020): 211-230.

¹⁸Hasbi Indra, "Pesantren and Entrepreneurship Education." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 17.2 (2019).

¹⁹Arian Agung Prasetyawan, and Asep Maulana Rohimat, "Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren dan Social Entrepreneurship," *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 11.2 (2019): 163-180.

²⁰Fahmi Ali Hudaefi and Neni Heryani, "The Practice of Local Economic Development and Maqasid al-Shari'ah: Evidence from a Pesantren in West Java, Indonesia", *International Journal of Islamic Middle Eastern Finance and Management* (2019).

Sukowono kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Pesantren yang saat ini diasuh oleh KH. Yazid Karimullah, terletak di daerah pedesaan di bagian Jember utara yang jauh dari hingar bingar perkotaan dengan jarak tempuh sekitar 25 KM dari pusat kota. Masyarakat sekitar pesantren memiliki minat tinggi terhadap kajian ilmu keagamaan dengan didasarkan pada jumlah santri yang terus meningkat setiap tahunnya.²¹ Hal ini mendorong YPI (Yayasan Pendidikan Islam) Pondok Pesantren Nurul Qarnain untuk terus membenahi dan melengkapi pendidikan Islam mulai tingkat dasar hingga pendidikan tinggi demi memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Selain itu, dalam bidang pengembangan pendidikan non formal PNQ melebarkan sayap kajiannya pada bidang, antara lain Kajian Kitab Kuning (*turath*), Taman Pendidikan al-Qur'an, Kursus Komputer, Kursus Bahasa Inggris, Kursus Bahasa Arab, Kursus Perbengkelan, Usaha Peternakan, Usaha Pertanian, Usaha Pertukangan, Usaha Perdagangan, Usaha Pertambangan, Usaha Perkebunan, dan lain sebagainya.²²

Kiprah dan bidang usaha yang paling tampak kentara dikembangkan sampai hari ini oleh PNQ adalah dalam empat kerangka dasar, yaitu: 1) Pertanian (tembakau, padi, jagung, kopi dan sebagainya); 2) Peternakan (peternakan ayam, ikan lele, angsa, sapi, kambing, dan sebagainya); 3) Perdagangan (koperasi dan berbagai macam kegiatan distribusi di dalam masyarakat, paket ini sejalan dan searah dengan kegiatan pertanian, karena aktifitas sehari-hari masyarakat sekitar pesantren adalah pertanian); 4) Pendidikan (sebagaimana tergambar di dalam program-programnya di atas).²³ Ekspansi PNQ di berbagai sektor, tidak terkecuali sektor bisnis dan ekonomi menepis anggapan bahwa pesantren itu tidak modern, kolot, kaku, dan anti modernitas.²⁴ Anggapan ini disandarkan pada penilaian mereka atas pesantren yang dipersepsikan kurang responsif terhadap perkembangan zaman dan kemajuan sains dan teknologi. Tidak berlebihan kiranya, jika persepsi atas pesantren semacam itu disebabkan kita tidak meng-*update* kognisi kita tentang perkembangan pesantren yang telah sedemikian pesatnya. Realitanya, pesantren merupakan lembaga yang fleksibel, luwes, dan elastis dalam menyikapi perubahan.²⁵ Sekalipun tidak latah terhadap berbagai bentuk perubahan zaman, pesantren terbukti mampu berdialektika dan berjaln kelindan dengan komunitas sosial-masyarakat setempat. Pesantren menunjukkan kepada dunia moderen bahwa ia bukan lembaga yang "keras kepala" dalam menyikapi perubahan zaman.²⁶

PNQ memiliki dua buah toko swalayan yang menjual produk lokal dan pabrikan. Pesantren ini juga memiliki usaha peternakan dan pabrik pakan ternak sendiri, menjadi bukti untuk itu. Usaha

²¹Lihat "Sejarah STIS Nurul Qarnain Jember" dalam <https://stisnq.ac.id/sejarah-stis-nurul-qarnain-jember/>, diakses 30 Januari 2022.

²²Lihat "Sejarah STIS Nurul Qarnain Jember" dalam <https://stisnq.ac.id/sejarah-stis-nurul-qarnain-jember/>, diakses 30 Januari 2022

²³Informasi dari KH. Yazid Karimullah (Pengasuh Utama) Pesantren Nurul Qornain.

²⁴Masdar Hilmy, "Kepemimpinan modern berbasis karakter pesantren." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 7.2 (2019): 89.

²⁵Mujammil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2007), 75; Masdar Hilmy, "Kepemimpinan modern berbasis karakter pesantren." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 7.2 (2019): 91.

²⁶Belakangan ini marak akan menjamurnya beberapa lembaga pendidikan Islam baru (*New Islamic educational institutions*) semisal Islamic Boarding School, Rumah Tahfidz, dan semacamnya yang terkadang menimbulkan pro kontra tersendiri di kalangan masyarakat modern.

peternakan ayam yang dikelola pesantren, misalnya, dapat dikatakan cukup besar. Dengan melalui kerjasama dengan seorang dermawan setempat, PNQ telah memiliki 100.000 ekor lebih ayam petelur. Ayam-ayam itu dikelola di sebuah lahan peternakan di tengah sawah, jauh dari perkampungan penduduk dan pesantren.²⁷ Yazid Karimullah menuturkan bahwa meski PNQ memiliki banyak unit usaha yang produktif, namun bukan berarti pihak keluarga dapat bertindak semaunya atas hasil usaha itu,²⁸ termasuk ketika anggota keluarga menginginkan telur hasil dari ternak yang sedang dikelola. Semua itu harus didapatkan dengan cara membeli, tidak cukup dengan meminta. Lanjut Yazid, "Pengelola PNQ mengajarkan bagaimana cara berbisnis yang benar. Bisnis ya bisnis, keluarga ya keluarga, tidak campur aduk. Dari laba hasil usaha pesantren, pemanfaatannya dilakukan secara profesional, tidak berbasis pada kepentingan keluarga. Laba hasil usaha digunakan untuk kepentingan pendidikan di pesantren, misalnya, ketika ada laba 10 juta, maka yang 9 juta dimanfaatkan untuk operasional pendidikan di pesantren; sedangkan yang 1 juta digunakan untuk kepentingan keluarga."²⁹

Dari sini tampak bahwa manajemen usaha pesantren dikelola secara profesional dan mengaminkan karakter pesantren yang terbuka (*open-minded*) atau inklusif sebagaimana diteorisasikan Mujamil Qomar.³⁰ Berbagai inovasi yang dilakukan pesantren membuktikan bahwa pesantren bukanlah institusi yang tertutup atau – meminjam istilah Masdar Hilmy – “kedap” terhadap perubahan.³¹ Para kiai (pengasuh pesantren) terbukti memiliki cakrawala yang luas dan terbuka atas berbagai perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dalam pengamatan Geertz, para kiai tersebut telah memainkan peran kuncinya sebagai *cultural broker* (makelar budaya) yang bertugas menyeleksi aspek-aspek budaya dari luar untuk dikunyah dan dikonsumsi oleh anggota komunitasnya.³² Dalam konteks inilah, turbin pesantren bekerja secara optimal dan melakukan berbagai inovasi dan kreasi, termasuk dalam hal ini adalah PNQ, yang kesemuanya itu berkat pemikiran kiai yang terbuka dan adaptif terhadap perubahan zaman. Jika dulu, misalnya, kita mendapati satu jenis model pesantren saja, seperti pesantren salaf, maka tidak demikian halnya dengan sekarang. Ada banyak jenis dan model pesantren dengan pengaksentuasian pembelajaran yang beranekaragam, namun tidak menanggalkan kultur pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fid din*. Ada pesantren yang menekuni bidang keknik atau teknologi, pertanian, usaha (*entrepreneurship*), dan lain-lain.³³ Ini semua membuktikan bahwa dunia pesantren memiliki watak yang terbuka terhadap segala bentuk perubahan. Dalam hal ini, PNQ menunjukkan karakter pesantrennya sebagai pesantren inklusif dengan membuka diri untuk bekerjasama dalam hal pengembangan usaha ekonominya. Bentuk kerjasamanya adalah pesantren

²⁷MajalahAula NU, No.05 Tahun XXIX, 70.

²⁸MajalahAula NU, No.05 Tahun XXIX, 72.

²⁹Informasi dari KH. Yazid Karimullah (Pengasuh Utama) Pesantren Nurul Qornain.

³⁰Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2007), 167; baca juga Abd. Halim, *Manajemen pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).

³¹Masdar Hilmy, "Kepemimpinan modern berbasis karakter pesantren." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 7.2 (2019): 89-106.

³²Clifford Geertz, "The Javanese Kijaji: The changing role of a cultural broker." *Comparative Studies in society and history* 2.2 (1960): 228-249; Masdar Hilmy, *Pendidikan Islam dan Tradisi Imiah* (Malang: Madani, 2016), 90.

³³Imam Bawani, dkk., *Pesantren Buruh Pabrik* (Yogyakarta: LKiS, 2011).

menyediakan lahan, manajemen, dan orang lain dapat mengisi lahan tersebut. Manajemen pembagian labanya adalah 40 persen untuk pesantren (yang mengelola) dan 60 persen untuk pemilik modal (orang yang mengisi). Daya dukung lain dalam pengembangan usaha di bidang ekonomi yang dikelola pesantren antara lain adanya pabrik dan SDM yang mudah dipenuhi. Aset usaha peternakan sekitar 10 Milyard lebih. Panen telur perhari antara 4-5 ton.³⁴

Munculnya inisiatif baru seperti yang dilakukan PNQ antara lain disebabkan karena pilihan rasional pemimpin pesantren (kiai) dalam mempertahankan tradisi Islam yang senada dengan perkembangan dan era disrupsi dan pandemi saat ini. Dalam perkembangan mutakhir, pesantren mengambil bagian dalam banyak aspek kehidupan melalui spesialisasi mereka.³⁵ Pesantren saat ini juga berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan dengan bermunculan berbagai macam pesantren yang tidak hanya mempelajari ajaran Islam tetapi juga disiplin ilmu lain seperti agribisnis, industri dan teknologi.³⁶ Beberapa varian pesantren baru muncul dengan mengintegrasikan disiplin ilmu agama dan ilmu pengetahuan seperti kegiatan ekonomi misalnya, Pesantren Alam Internasional Saung Balong al-Barokah,³⁷ Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan,³⁸ Pesantren Mukmin Mandiri, Sidoarjo dan Pesantren Mambaus Sholihin, Suci, Gresik,³⁹ Pondok Pesantren Sunan Drajat, Paciran, Lamongan,⁴⁰ dan sebagainya. Varian pesantren inilah yang nantinya semakin memperkaya cakrawala masyarakat tentang persepsi pesantren yang dulunya kolot, kaku, tidak modern, menjadi makin modern, semakin profesional, dan melek teknologi serta adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

C. Argumen PNQ dalam Pemberdayaan Ekonomi

Alasan utama yang mendasari pengembangan usaha ekonomi di PNQ adalah pesan sang guru, KH As'ad Syamsul Arifin (Almarhum), Pendiri Pesantren Asy Syafi'iyah Asembagus Sukorejo Sitobondo. Guru dari KH Yazid Karimullah ini berpesan, bahwa kalau mengandalkan pemasukan pesantren dari pemberian orang, laparnya akan lama, tetapi kalau dapat mengembangkan usaha secara mandiri, maka akan cepat punya kecukupan (*cong, nek ngandalno dike'i wong, lapare suwe, tapi nek usaha dewe, biso cepet suge*).⁴¹ Dengan demikian, paradigma yang dibangun oleh guru dari KH. Yazid

³⁴Informasi dari H. Imam Syafi'i (Pengasuh) Pesantren Nurul Qornain.

³⁵Masdar Hilmy, "Kepemimpinan modern berbasis karakter pesantren." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 7.2 (2019): 89-106.

³⁶Imron Muttaqin, "Types and Characteristics of Kyai Leadership Within Pesantren." *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan* 20.1 (2020): 165-174.

³⁷Asep Kurniawan, "Manajemen Kerjasama Pondok Pesantren Alam Internasional Saung Balong Al-Barokah dengan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi dan Pendidikan." *Quality* 2.1 (2014): 21-55.

³⁸Noor Ahmady, *Pesantren Dan Kewirausahaan: Peran Pesantren Sidogiri Pasuruan Dalam Mencetak Wirausaha Muda Mandiri* (Penelitian Individu, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

³⁹Zumrotus Sholikhah, *Edupreneurship dalam mengembangkan karakter kemandirian santri: studi multikasus pondok pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo dan pondok pesantren Mambaus Sholihin Gresik* (Master thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

⁴⁰Bella Suci Nur, and Achsanida Hendratmi. "Pengembangan Layanan Keuangan Digital pada Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Kasus Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7.3 (2020): 532-543.

⁴¹Informasi dari KH. Yazid Karimullah (Pengasuh Utama) Pesantren Nurul Qornain.

Karimullah, pengasuh PNQ, dalam derajat tertentu, banyak diilhami oleh doktrin-doktrin Aswaja yang sudah tersohor seperti filosofi *tawassuth* (jalan tengah), *i'tidal* (adil), *tawazun* (keseimbangan), dan tentu aspek kemandirian (*mal*), yang kesemuanya itu memiliki jangkar *maqashid al-shariah*-nya. Sebagaimana diketahui bersama, tema sentral muktamar NU ke-34 di Lampung pada 22-23 Desember 2021, yaitu "Menuju Satu Abad NU, Membangun Kemandirian Warga untuk Perdamaian Dunia." Tema ini bukanlah isapan jempol belaka, selama ini kemandirian rakyat Indonesia dalam berbagai bidang, sangatlah minim. Kerisauan dan keprihatinan NU akan keterbelakangan kemandirian inilah yang salah satunya juga dirasakan oleh KH. Yazid Karimullah yang olehnya diterjemahkan melalui pengembangan unit bisnis pesantren dalam rangkai mencapai taraf kemandirian, kemakmuran dan kesejahteraan pesantren untuk masyarakat sekitar khususnya. Paradigma yang dibangun oleh KH. Yazid di atas menjadi bukti untuk itu.

Dalam kaitan ini, PNQ telah mengembangkan beberapa usaha di bidang ekonomi produktif antara lain: (1). Pertanian, sektor ini merupakan usaha pertama yang dirintis pesantren; (2) Peternakan: Ayam, Sapi, Kambing, dan lain-lain; sektor ini dilakukan dengan bekerja sama Bersama masyarakat sekitar; sektor peternakan ayam saat ini merupakan bagian primer dari pengembangan usaha ekonomi di PNQ; (3) Perdagangan atau pertokoan, sektor ini menjadi bagian dari upaya untuk mendistribusikan berbagai produk usaha PNQ, disamping juga untuk menjual barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat; (4). Pertambangan, sektor ini masih dalam proses pertumbuhan; (5). Perkebunan, sektor ini masih dalam tahap awal perintisan dan masih memakai sistem persewaan (disewakan kepada orang lain). Alasan pemilihan bidang-bidang usaha yang dipilih PNQ adalah karena: (1) Melihat potensi utama daerah pedesaan-pertanian Desa Baletbaru Sukowono Jember; (2) Adanya potensi area pesantren yang cukup luas dan memadai untuk usaha-usaha di bidang ekonomi tersebut di atas; (3) Adanya background para pengasuh PNQ yang sedikit banyak punya skill dalam usaha-usaha di bidang ekonomi sebagaimana tersebut diatas; (4) Adanya kebutuhan masyarakat sekitar.⁴²

Sejak adanya usaha di bidang ekonomi yang dikembangkan PNQ, maka dapat dikatakan bahwa sejak tahun 1994, pembangunan di pesantren selalu berjalan dan tidak pernah berhenti.⁴³ Biaya pembangunan ini di samping berasal dari donatur, juga dari laba usaha yang dikembangkan oleh PNQ. Sumbangan dari donatur secara sukarela dan tidak mengikat tetap diterima, tetapi laba dari hasil usaha di bidang ekonomi yang dikembangkan pesantren menjadi donasi primer yang *men-support* eksistensi PNQ, santri dan masyarakat. Dengan demikian swadana terbesar di PNQ adalah hasil usaha yang memang dikelola pesantren dan ini sangat membantu santri dan masyarakat sekitar. Bagi santri, hasil usaha pesantren dapat membantu meringankan biaya iuran pesantren. Bagi masyarakat, mereka dapat mengakses usaha pesantren dengan menjadi karyawan atau konsumen dari hasil usaha tersebut. Oleh karena itu, pesantren tidak hanya sekadar sebagai lembaga pendidikan, dan pengajaran

⁴²Informasi dari KH. Yazid Karimullah (Pengasuh Utama) Pesantren Nurul Qornain.

⁴³Informasi dari KH. Yazid Karimullah (Pengasuh Utama) Pesantren Nurul Qornain.

keagamaan, melainkan juga sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi sehingga tak heran masyarakat pun menjadi dekat dengan pesantren. Jika ada masyarakat memiliki kebutuhan yang sulit terpenuhi, lalu mengeluh kepada pesantren, dan saat itu pesantren mampu untuk membantu, maka pesantren pun bersedia dengan senang hati untuk membantu. Sebagai contoh, soal ternak penggemukan sapi, banyak masyarakat yang ingin ternak penggemukan sapi, tetapi tidak punya dana, lalu melapor ke pesantren, akhirnya pesantren membelikan sapi yang kemudian dirawat untuk dibesarkan oleh masyarakat tersebut.⁴⁴

Manfaat riil yang dapat diakses dari keberadaan PNQ, baik dalam hal usaha di bidang pendidikan, dakwah, maupun ekonomi adalah dalam hal pendidikan, misalnya, masyarakat dapat mengakses proses belajar mengajar yang ada di pesantren. Kemudian, dalam segi dakwah, masyarakat dapat meminta fatwa-fatwa agama dari para pengasuh pesantren. Selanjutnya, dalam hal ekonomi, masyarakat dapat ikut bekerja sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat. Santri juga sangat terbantu dengan adanya usaha di bidang ekonomi yang dikembangkan oleh PNQ.⁴⁵

Dengan ungkapan yang tulus dari Gus Imam Syafi'i, beliau menyatakan, bahwa usaha-usaha di bidang ekonomi yang dikelola PNQ (terutama usaha peternakan), dirasakan cukup membantu pada akses kerja masyarakat. Masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, oleh PNQ dapat diterima kerja dalam membantu mengelola usaha peternakan pesantren, dan/atau usaha-usaha ekonomi lain yang dikembangkan oleh pesantren. Dengan demikian masyarakat merasa terbantu dengan adanya usaha-usaha ekonomi yang dikembangkan oleh PNQ.⁴⁶ PNQ menjadi tempat menimba ilmu bagi masyarakat dengan biaya yang amat murah.⁴⁷ Hal ini disebabkan karena operasional pesantren banyak didukung oleh hasil usaha di bidang ekonomi yang dikembangkan oleh pesantren. Dengan demikian, kontribusi riil dari pesantren terhadap masyarakat semakin nyata. Oleh karenanya, pesantren ini menjadi semakin dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat pun merasa banyak terbantu.⁴⁸ Bentuk kontribusi PNQ yang diberikan kepada masyarakat antara lain: akses kerja, akses pendidikan murah, dan masih banyak lagi.

Dalam konteks ini, selain pelayanan keagamaan, PNQ secara moral berkewajiban memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat sekitarnya. Integrasi – meminjam istilah Bambang Budiwiranto – “pembangunan partisipatif” ke dalam kehidupan pesantren merupakan salah satu cara pesantren memenuhi kebutuhan tersebut.⁴⁹ Menurut KH. Yazid, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa di sekitar pesantren sangat memprihatinkan seperti yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, KH.

⁴⁴Informasi dari KH. Yazid Karimullah (Pengasuh Utama) Pesantren Nurul Qornain.

⁴⁵Informasi dari H. Imam Syafi'i (Pengasuh) Pesantren Nurul Qornain.

⁴⁶Informasi dari Arifin (Warga Masyarakat) sekitar Pesantren Nurul Qornain

⁴⁷Informasi dari Ridwan (Warga Masyarakat) sekitar Pesantren Nurul Qornain.

⁴⁸Informasi dari Ye (Warga Masyarakat) sekitar Pesantren Nurul Qornain.

⁴⁹Bambang Budiwiranto, "Pesantren and participatory development: the case of the Pesantren Maslakul Huda of Kajen, Pati, Central Java." *Journal of Indonesian Islam* 3.2 (2009): 267-296.

Yazid mengembangkan minat untuk meningkatkan peran pesantren dari sekadar lembaga keagamaan menjadi penyedia layanan sosial.

Di satu sisi, pengembangan partisipatif membuka peluang bagi pesantren untuk terlibat dalam bakti sosial secara lebih terorganisir. Di sisi lain, ia menganjurkan demokratisasi, dan cenderung mengurangi dominasi pesantren atas komunitasnya. Pembangunan partisipatif secara metaforis dianggap sebagai arus besar yang memasuki kehidupan pesantren.⁵⁰ KH. Yazid, menurut hemat kami, ia menerapkan strategi kanalisasi dalam mengadopsi pembangunan partisipatif. Pesantren memiliki kemampuan untuk mengarahkan perubahan agar sesuai dengan tujuannya sendiri dengan mendistribusikan 'aliran' ini ke kanal-kanal. Pesantren juga dapat mengarahkan aliran-aliran baru ke dalam kanal-kanal tersebut untuk membantu mencapai tujuannya sendiri, seperti meningkatkan perannya dalam kegiatan sosial. Meskipun pesantren melakukan pembangunan partisipatif, ia tidak melepaskan dominasinya dalam masyarakat.⁵¹

KH. Yazid menjustifikasi pembangunan partisipatif sebagai 'ibadah'⁵² (ibadah) sosial, yang manfaatnya tidak hanya bagi individu yang mengarahkannya, tetapi juga bagi publik. Lebih lanjut, ia meyakini bahwa penerapan pembangunan partisipatif memenuhi salah satu kewajiban seorang pemimpin Muslim terhadap pengikutnya. Argumennya mengungkapkan tidak hanya perannya sebagai perantara budaya, sebagaimana didefinisikan oleh Geertz,⁵³ tetapi juga kreativitasnya dalam melakukan penyesuaian dan inovasi untuk membantu para jama'ahnya dalam memahami dan menerima perubahan sosial yang baru.⁵⁴ Fenomena ini mengakar kuat pada tradisi pesantren yang didasarkan pada prinsip fikih *al-muhafadhah `ala al-qadim al-shalih wa al-akhdh bi al-jadid al-ashlah* (mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik). Prinsip ini merupakan mekanisme kelangsungan hidup bagi pesantren—mereka dapat mendorong perubahan sosial tanpa mencabut nilai-nilai tradisional.

D. Pesantren, Ekonomi dan Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif *Maqashid al-Shari'ah*

Modernisasi "memaksa" pesantren melakukan terobosan baru sangat dibutuhkan oleh pesantren, antara lain dengan memperluas "mandat ekonomi." Dengan kata lain, pesantren tidak hanya sebagai "perantara budaya," tetapi juga "perantara ekonomi." Pesantren perlu lebih menitikberatkan pada kegiatan ekonomi guna memperkuat "buffer zone"-nya. Pendidikan

⁵⁰Bambang Budiwiranto, "Pesantren and participatory development: the case of the Pesantren Maslakul Huda of Kajen, Pati, Central Java", 267-296.

⁵¹Bambang Budiwiranto, "Pesantren and participatory development: the case of the Pesantren Maslakul Huda of Kajen, Pati, Central Java", 286.

⁵²Dalam konteks ini, 'ibadah' dipahami bukan dalam arti melaksanakan shalat tetapi dari setiap kegiatan baik yang dilakukan demi Allah yang juga bermanfaat bagi manusia. Hal ini senada dengan konsep dakwah bi al-h}a>l yang dikemukakan oleh Kyai A Basith dari pesantren Annuqayah. Bambang Budiwiranto, "Pesantren and participatory development: the case of the Pesantren Maslakul Huda of Kajen, Pati, Central Java", 267-296.

⁵³Clifford Geertz, "The Javanese Kijaji: The Changing Role of A Cultural Broker," *Comparative Studies in Society and History*, 2: 2 (1960): 228-249.

⁵⁴Hiroko Horikoshi, *A Traditional Leader in a Time of Change* (Unpublished Ph. D Thesis, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1976).

kewirausahaan dan pemagangan santri di bidang ekonomi-industri, dan jaringan pesantren dengan dunia industri dapat menjadi syarat utama perluasan “mandat ekonomi” pesantren.⁵⁵

Perluasan mandat ekonomi sebenarnya bukan hal baru bagi pesantren. Modal produksi ekonomi berbasis pesantren telah banyak dilakukan, namun masih terbatas pada beberapa pesantren. Pesantren Sidogiri di Pasuruan, Gontor di Ponorogo, Azzaitun di Indramayu, Darut Tauhid di Bandung, Pesantren Pertanian “Darul Falah” di Bogor hanyalah beberapa contoh pesantren sukses yang sampai taraf tertentu berhasil menggerakkan mode produksi ekonomi pesantren.⁵⁶ Namun secara umum, kerja ekonomi yang dilakukan pesantren dilakukan secara parsial, dan tidak dalam tataran jejaring ekonomi yang lebih luas antar pesantren yang dapat berkontribusi dalam penciptaan daya tawar yang baik bagi lembaga-lembaga ekonomi di luar pesantren. Selain itu, cara produksi ekonomi pesantren dilakukan untuk dirinya sendiri, bukan ekonomi masyarakat luas.

Perluasan mandat (*wider mandate*) ekonomi pesantren di atas juga terjadi pada Pesantren Nurul Qornain (PNQ). PNQ, selain berperan sebagai lembaga transmisi keilmuan Islam, tetapi juga berperan dalam hal pemberdayaan di bidang usaha ekonomi. Setidaknya terdapat tiga faktor yang berperan dalam penyelenggaraan pesantren, yaitu manajemen sebagai faktor upaya, organisasi sebagai faktor sarana, dan administrasi sebagai faktor kuasa. Keberadaan faktor-faktor ini memberikan arah perpaduan dalam merumuskan, mengendalikan menyelenggarakan, mengawasi serta menilai pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam usaha penyelenggaraan kegiatan yang sesuai dengan tujuan pendidikan pesantren.⁵⁷

Dari hasil kajian, setidaknya ada dua (2) paradigma dominan yang menjadi pandangan kalangan pesantren.⁵⁸ *Pertama*, paradigma pesantren sebagai lembaga keulamaan. Dalam konteks ini pesantren dipahami hanya sebagai tempat pengajaran dan pembelajaran agama untuk mencetak para calon ulama yang nantinya diterjunkan ke tengah masyarakat. Untuk itu dipandang naif mengembangkan pesantren untuk keperluan di luar kerangka pendidikan agama dan keulamaan, misalnya, pesantren untuk pendidikan usaha pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Paham ini masih kuat mendominasi pandangan kebanyakan pesantren di negeri ini.

Kedua, paradigma pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat. Paradigma ini beranggapan bahwa pesantren merupakan lembaga yang pantas dan strategis untuk pengembangan masyarakat sekitar, pesantren dianggap mempunyai elastisitas yang tinggi dalam menyikapi setiap bentuk masyarakat yang ada, sekaligus mempunyai bahasa-bahasa yang lebih diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu pesantren perlu dikembangkan lebih lanjut sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, selain sebagai tempat penggodokan calon ulama. Paradigma ini mulai muncul sekitar

⁵⁵Masdar Hilmy, "Towards a "Wider Mandate" of Pesantren: In Search For A New Nomenclature Of Political Role Of Pesantren In An Era Of Democracy", 51-73.

⁵⁶Masdar Hilmy, "Towards a "Wider Mandate" of Pesantren: In Search For A New Nomenclature Of Political Role Of Pesantren In An Era Of Democracy", 51-73.

⁵⁷Departemen Agama RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren* (Jakarta: Depag RI., 2000), 20.

⁵⁸Ziemek Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1986), 211.

tahun 1990-an bersamaan dengan munculnya gagasan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Dalam bahasa Azyumardi Azra, pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat ini merupakan bagian *dari wider mandate* pesantren.⁵⁹

Pesantren perlu memperluas mandat dari sekadar sebagai lembaga yang mengajarkan keilmuan agama menjadi lembaga yang multifungsi, termasuk kaya akan keilmuan umum. Pesantren perlu juga mengaksentuasikan pembelajaran keilmuan di bidang olahraga, berhitung, kesenian, bahasa internasional dan lain-lain, bahkan perlu juga diberikan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan yang selaras dengan perkembangan zaman.⁶⁰ Semua ini diperlukan agar pesantren tidak sekadar menjalankan peran pentingnya dalam tiga hal saja, yaitu transmisi ilmu-ilmu keagamaan Islam, pemeliharaan tradisi ke-Islaman, dan reproduksi ulama.⁶¹ Akan tetapi pesantren juga dapat mencetak alumni yang menguasai keilmuan agama dan umum serta keterampilan tertentu. Hal ini sebagian sudah dilakukan oleh PNQ dalam bentuk pengembangan usaha ekonomi yang berkontribusi nyata bagi pemberdayaan santri dan masyarakat.

Pesantren diharapkan mampu mencetak santri yang dapat memiliki keahlian, keterampilan, *lifeskills* yang menjadi tuntutan globalisasi, yang menjadikan mereka mendapatkan dasar pengembangan kompetitif (*competitive advantage*) dalam dunia kerja.⁶² Pengembangan *competitive advantage* di pesantren bukan merupakan hal yang mudah dilakukan. Mengingat, pengembangan tersebut bukan hanya memerlukan ketersediaan SDM yang *qualified*, laboratorium atau bengkel kerja dan perangkat lain yang siap pakai, tetapi juga memerlukan perubahan pola pikir dan sikap para civitas pesantren.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi santri, ke depan *output* pesantren, - kalau boleh membuat pemetaan – perlu kiranya pesantren dipetakan dalam kategori-kategori yang lebih tegas, sejauh mana pesantren menargetkan *output* santri yang dihasilkan. Dalam kajian ini –meminjam ide Murtadho- penulis mengklasifikasikan beberapa macam tipe umum karakter pesantren dilihat dari target *output* yang dimiliki.⁶³ *Pertama*, pesantren yang hanya menghasilkan *output* santri yang berkepribadian saleh dan memahami ajaran-ajaran dasar agama. Santri pesantren model ini belum tentu berkemampuan dapat membaca kitab kuning secara sendiri ketika keluar dari pesantren. Pesantren ini diberi tipe D.

Kedua, pesantren yang mempunyai target *output* santri yang berkepribadian saleh dan mempunyai keahlian praktis lain atau keterampilan khusus, misalnya, terampil bahasa asing, terampil di bidang pertanian, peternakan dan sebagainya. Pesantren model ini diberi Tipe C. *Ketiga*, pesantren yang mempunyai target *output* santri yang berkepribadian saleh dan mampu menguasai kitab-kitab

⁵⁹Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000).

⁶⁰N. Masruroh dan Umiarso, *Modernisasi Pendidikan Islam Ala Azyumardi Azra* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 174.

⁶¹Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 89.

⁶²Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 136.

⁶³M. Murtadho, "Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi", dalam www.balitbangdiklat.kemenaq.go.id, diakses pada 19 September 2020.

klasik serta mampu membaca kitab kuning sendiri. Pesantren jenis ini diklasifikasikan sebagai pesantren jenis B. *Keempat*, pesantren yang mempunyai target *output* santri yang berkepribadian saleh dan mampu menguasai kitab-kitab klasik dan mampu membaca kitab kuning sendiri serta mempunyai keahlian khusus tertentu. Pesantren ini dijeniskan sebagai pesantren model A.

Tabel 1:
Target Output Santri Pesantren

Tipe Pesantren	Target Output Santri		
	Berkepribadian saleh & paham ajaran-ajaran dasar agama	Mampu membaca kitab kuning & menguasai kitab-kitab klasik	Mempunyai keterampilan praktis tertentu (misal: terampil bahasa asing, pertanian, pertukangan, elektronik, otomotif, dan sebagainya)
A	√	√	√
B	√	√	
C	√		√
D	√		

Melihat jenis klasifikasi diatas, Pesantren Nurul Qomain (PNQ), yang memberikan bekal keilmuan kitab kuning, pembelajaran bahasa, juga keilmuan umum, dan praktik pengembangan usaha di bidang ekonomi yang berkontribusi pada pembekalan keterampilan santri dan pemberdayaan masyarakat, merupakan manifestasi konkret yang dilakukan pesantren; dengan demikian pesantren tersebut dapat dikategorikan dalam klasifikasi pesantren tipe A.

Kalau mencermati perilaku ekonomi di pesantren, setidaknya ada empat (4) macam kemungkinan pola usaha ekonomi di lingkungan pesantren. *Pertama*, usaha ekonomi yang berpusat pada kiai sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam mengembangkan pesantren, misalnya, seorang kiai mempunyai perkebunan tembakau yang luas. Untuk pemeliharaan dan pemanenan, kiai melibatkan santri-santrinya untuk mengerjakannya, sehingga terjadi hubungan simbiosis mutualisme dan saling menguntungkan; Kiai dapat memproduksi perkebunannya, santri mempunyai pendapatan tambahan; dengan keuntungan yang dihasilkan, Kiai dapat menghidupi kebutuhan pengembangan pesantrennya.

Kedua, usaha ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren. Misalnya, pesantren memiliki unit usaha produktif seperti menyewakan lahan pertambangan, gedung pertemuan, rumah dan sebagainya. Dari keuntungan usaha-usaha produktif ini pesantren mampu membiayai dirinya, sehingga seluruh biaya operasional pesantren dapat ditalangi oleh usaha ekonomi ini. *Ketiga*, usaha ekonomi untuk santri dengan memberi keterampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak keterampilan itu dapat dimanfaatkan Ketika sudah keluar atau lulus dari pesantren. Pesantren membuat program pendidikan sedemikian rupa yang berkaitan dengan usaha ekonomi, seperti, pertanian dan peternakan. Tujuannya semata-mata untuk membekali santri agar mempunyai

keterampilan tambahan, dengan harapan menjadi bekal untuk mencari pendapatan hidup. *Keempat*, usaha ekonomi bagi para alumni santri. Pengurus pesantren dengan melibatkan para alumni santri menggalang sebuah usaha tertentu dengan tujuan untuk menggagas suatu usaha produktif bagi individu alumni, syukur jika nanti keuntungan selebihnya dapat digunakan untuk mengembangkan pesantren. Prioritas utama tetap untuk pemberdayaan para alumni santri.

PNQ termasuk jenis pesantren yang menyelenggarakan pola ekonomi dengan model-model di atas. Subjek yang paling berperan dalam pengembangan usaha ekonomi di PNQ adalah sang kiai. Hasil usaha pengembangan ekonomi di pesantren ini dipakai untuk menopang biaya operasional pesantren. Selain itu, pesantren juga memberikan bekal keterampilan bagi para santrinya di bidang kegiatan ekonomi. Bahkan pesantren ini bekerjasama dengan alumni santri dalam mengembangkan usaha ekonominya. PNQ telah menerapkan konsep pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat. Pesantren tidak hanya sebagai lembaga pencetak calon ulama, tetapi sudah dianggap sebagai satu bagian integral dari masyarakat yang perlu terlibat aktif dalam proses perubahan sosial.

Dalam perspektif *maqashid as-shari'ah*,⁶⁴ eksistensi PNQ dalam pengembangan usaha ekonomi sejalan dengan unsur pemeliharaan dan pengembangan ekonomi atau harta (*hifdlul mal*).⁶⁵ Pemeliharaan dan pengembangan harta atau ekonomi dalam *shari'at* agama Islam sangat dipentingkan karena instrumen ekonomi menjadi salah satu media untuk menopang kekuatan agama. *Maqashid as-Shari'ah* terkait erat dengan *al-Qawa'id al-tashri'iyah* (kaidah-kaidah sharia't), yaitu tata aturan yang dijadikan pedoman dalam menyusun undang-undang dan merealisasikan tujuan yang ingin dicapai melalui pemberian beban kewajiban kepada orang-orang mukallaf.⁶⁶ Kaidah-kaidah ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh hukum dengan mengedepankan aspek *maqashid al-shari'ah* daripada *wasilah al-shari'at* (sarana shari'at)-nya.

Berdasarkan pendapat al-Shatibi (w. 790 H), *maqashidas-shari'ah* ini dibagi dalam tiga (3) kelompok atau tingkatan dilihat dari segi kekuatan dzat-nya, yaitu *dlaruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. *Pertama*, *dlaruriyat*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan demi tegaknya kemaslahatan agama (*din*) dan dunia. Dengan kata lain, apabila ada yang hilang maka kemaslahatan *dien* dan dunia tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya, bahkan akan mengalami kerusakan, kegoncangan serta lenyapnya kehidupan; selain itu kenikmatan akan sirna dipenuhi dengan

⁶⁴*Maqasid al-Syari'ah* adalah maksud dan tujuan hukum Islam, dan merupakan cabang ilmu pengetahuan Islam yang mencakup jawaban atas semua pertanyaan pada berbagai tingkatan. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama (Maqasid) dari Syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia atas: menjaga iman (din); menjaga kehidupan (nafs); menjaga akal ('aql); menjaga keturunan (nasl); dan menjaga kekayaan (mal). Lihat Fahmi Ali Hudaefi, and Neni Heryani. "The practice of local economic development and Maqāsid al-Sharī 'ah: Evidence from a Pesantren in West Java, Indonesia." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* (2019): 625-42; Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014).

⁶⁵Jasser Auda, "Maqasid al-Shari'ah: an introductory Guide." *Herndon: International Institute of Islamic Thought*, (IIIT) (2008); Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach* (United Kingdom: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008); Ibrahim Abiodun Oladapo and Asmak Ab Rahman. "Maqasid Sharī 'Ah: the drive for an inclusive human development policy." *Jurnal Syariah* 24.2 (2017).

⁶⁶Auda, *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*; "Maqasid al-Shari'ah: an introductory Guide." Herndon: International Institute of Islamic Thought, (IIIT) (2008); Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung, Al-Ma'arif, 1993), 331.

kerugian.⁶⁷ Ibn Ashur menyatakan bahwa, *mashlahat dlaruriyat* adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia, tanpanya aturan tidak dapat berjalan dengan lurus, jika *mashlahat* itu rusak maka keadaan umat akan rusak.⁶⁸ Kemaslahatan tersebut merupakan hasil dari pembacaan (sebagaimana yang dikatakan oleh al-Shatibi), yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.⁶⁹

Kedua, hajiyat, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya untuk memberi kemudahan dan tanpa keberadannya akan timbul kesulitan. Jika hal ini tidak dijaga maka manusia akan merasakan berat dalam beban hidupnya, namun tingkat kerusakannya tidak sebagaimana yang biasa terjadi di tingkat umum.⁷⁰ Ibn Ashur menyatakan bahwa, *hajiyat* adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh manusia agar *mashlahah* dan kebutuhannya tercapai dengan hasil yang baik, dan ketiadaannya tidak menimbulkan kerusakan, hanya saja kurang sempurna, oleh karena itu tidak sampai tingkat *dlaruri*.⁷¹ *Ketiga, tahsiniyat*, yaitu melakukan sesuatu yang termasuk kebaikan dalam tradisi dan menjauhi perilaku buruk yang tercela menurut akal yang benar, contohnya terhimpun dalam kategori akhlak terpuji.⁷² Menurut Ibn Ashur, *tahsiniyat* adalah kemaslahatan yang memberi kesempurnaan dan keteraturan bagi kondisi manusia, sehingga mereka dapat hidup dengan aman, tentram serta tampak indah dalam pandangan orang lain.⁷³

Pengembangan usaha ekonomi yang dilakukan PNQ yang secara aksiologi dapat memperdayakan santri dan masyarakat yang terlibat -menurut penulis- masuk dalam kategori *maqashid al-shari'at* tingkat *hajiyat*, yaitu suatu kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya bersifat memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan akses kerja sebagai kebutuhannya. Mengenai cara untuk mengetahui *maqashid al-shari'ah*, menurut al-Shatibi adalah sebagai berikut.⁷⁴

Pertama, maqashid al-shari'ah diketahui melalui perintah dan larangan yang bersifat *ibtida'iy* dan *tashri'iy* yang terdapat dalam al-Quran. Adanya perintah dari *shari'at* menunjukkan bahwa sesuatu yang diperintahkan itu dikehendaki Allah SWT untuk diwujudkan dan dilaksanakan oleh *mukallaf* sebagai seseorang yang diperintahkan untuk mengerjakannya. Demikian pula, adanya larangan dari *shari'at* berarti bahwa sesuatu yang dilarang itu dikehendaki-Nya untuk tidak diwujudkan. Melakukan larangan bertentangan dengan maksud-Nya, sebagaimana tidak melaksanakan perintah juga bertentangan dengan maksud-Nya. Adanya batasan kata *ibtida'iy* (langsung) mengecualikan perintah dan larangan yang dimaksudkan untuk hal lain. Ini tidak termasuk dalam kategori di atas, misalnya, Q.S. al-Jumu'ah[62]: 9, "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat,

⁶⁷Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Juz II (Kairo: Mustafa Muhammad, n.d.), 17-18.

⁶⁸Muhammad ibn Thahir ibn 'Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2006), 76.

⁶⁹Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, 20.

⁷⁰Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, 20.

⁷¹Ibn Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah*, 80.

⁷²Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, 22.

⁷³Ibn Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah*, 81.

⁷⁴Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 275-291.

maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Perintah untuk meninggalkan jual beli di atas tidak bersifat langsung dan tidak menjadi tujuan utama, akan tetapi dimaksudkan untuk menguatkan perintah agar bergegas menuju ke masjid tempat pelaksanaan shalat Jumat dalam rangka mengingat Allah SWT. *Kedua*, meninjau terhadap *'illat* dan kemaslahatan yang berada di balik perintah dan larangan. Mengapa hal ini diperintahkan dan mengapa hal itu dilarang. Jika *'illat* hukum suatu hal diketahui, maka harus diikuti. Selama ada alasan hukum suatu perintah atau larangan, maka tuntutan perintah atau larangan itu ada dan dikehendaki.

Dengan demikian dapat dilakukan pengembangan hukum dengan berdasarkan *'illat* hukum itu. Misalnya, kawin dimaksudkan untuk kepentingan memperoleh keturunan, jual beli dimaksudkan untuk kepentingan pemanfaatan barang yang dibeli, dan hukum balasan (*had*) dimaksudkan untuk membuat jera dan upaya preventif. Berdasarkan *'illat* hukum tersebut maka dimungkinkan pengembangan hukum pada bidang-bidang tersebut. Selanjutnya jika *'illat* hukum itu tidak diketahui, maka harus bersikap *tawaqquf* atau tidak mengklaim bahwa maksudnya adalah demikian.

Dalam hal pengembangan usaha ekonomi di PNQ, *maqashid al-shari'ah* melihat bahwa wujud usaha ekonomi yang dikembangkan di PNQ mendukung tercapainya syariat agama Islam. Dalam aspek ekonomi, misalnya, Islam menganggap penting unsur ekonomi untuk dipelihara dan dikembangkan. Ekonomi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memaksimalkan ibadah seperti zakat, infaq, shadaqah, biaya haji, pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, masjid, santunan sosial, dan masih banyak lagi. Di PNQ, hasil usaha ekonomi juga dimanfaatkan untuk membantu santri dalam hal operasionalisasi pendidikan (pemberian beasiswa, misalnya) di pesantren tersebut.

Dari sisi *illat* (alasan), yang mendasari PNQ dalam mengembangkan usaha ekonomi adalah pesan sang guru dari pengasuh PNQ, bahwa jika pesantren ingin berkembang dengan pesat, maka perlu memiliki usaha di bidang ekonomi; tapi jika perkembangannya ingin berjalan lamban, maka tidak perlu memiliki usaha di bidang ekonomi, cukup mengandalkan bantuan dari para donatur. Bagi PNQ, apapun yang menjamin terpeliharanya kelima hal di atas (yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta), melayani kepentingan umum dan apapun yang dapat merusak atau bertentangan dengan kemaslahatan bersama, maka harus dilakukan.⁷⁵ Merujuk pada Al-Ghazali, bahwa kelima tujuan syariat itu saling bergantung; dengan demikian, setiap tujuan sama pentingnya. Karena Maqasid al-Shari'ah mempertimbangkan kesejahteraan individu dan masyarakat, ia memiliki peran mutlak untuk mencegah kehancuran dalam masyarakat, dan merupakan alternatif yang menjanjikan untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan manusia.⁷⁶ Oleh karenanya, dalam konteks ini, pesantren perlu memperluas mandat ekonomi (*wider mandate*) dengan cara pesantren harus memiliki

⁷⁵Nizam, I. *A Proposed Maqasid Al-Shari'ah Based Measurement of Socioeconomic Prosperity: A Composite Index for OIC Member Countries*, International Islamic University of Malaya, Kuala Lumpur, 2017.

⁷⁶Auda, *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*; Oladapo, Ibrahim Abiodun, and Asmak Ab Rahman. "Maqasid Shari'ah: the drive for an inclusive human development policy".

kemandirian, salah satunya di bidang ekonomi. Hal ini perlu dicontoh oleh lembaga-lembaga Pendidikan Islam yang lain agar dapat mandiri dan lebih berwibawa daripada sekadar mengharapkan uluran bantuan dari orang lain. Hal ini senada dengan *maqashid al-shari'ah*.

Dengan demikian, perluasan mandat PNQ di sektor ekonomi, dapat dipahami sebagai bentuk manifestasi dari *maqashid al-shari'ah*. PNQ telah menawarkan kesempatan kerja bagi penduduk setempat yang sebagian besar kurang mampu dan beragama Islam, pesantren telah menjadi media bagi mereka untuk mencari penghasilan pasif, dan dengan demikian meningkatkan kualitas hidup mereka. Bahkan, pesantren menjadi inkubator penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Dalam sudut yang lebih luas, kita dapat mengenali bahwa baik konsep perluasan mandat ekonomi PNQ dalam perspektif Maqasid al-Shari'ah secara jelas mempromosikan gerakan kesejahteraan manusia. Atas dasar ini, konsep-konsep tersebut dapat diselaraskan dan dipadukan dalam konteks *maqashid al-shari'ah*.

E. Kesimpulan

Sebagai penutup, penulis menyimpulkan bahwa, apa yang dilakukan Pesantren Nurul Qornain (PNQ) dengan memperluas mandat di bidang ekonomi menjadi solusi di tengah gempuran modernisasi. Dengan melibatkan alumni santri dan masyarakat lokal, beberapa unit usaha yang dilakukan antara lain pertanian, perdagangan, peternakan, perkebunan, pertambangan. Dalam pengembangan usaha, PNQ membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersedia untuk bekerja sama, baik di bidang pengelolaan maupun manajemen dan *sharing* teknologi. Dalam proses pengelolaannya, sosok atau figur kunci (misalnya, kiai) menjadi faktor sentral dalam kurikulum dan manajemen pesantren – termasuk pengembangan unit bisnis pesantren – dan tepat kiranya Geertz menyebut para kiai sebagai *cultural broker*. Terbentuknya hubungan sosial ekonomi antara pesantren dengan masyarakat dimana warga Sukowono dan masyarakat desa sekitarnya melahirkan pola-pola perilaku ekonomi. Kegiatan ekonomi yang memberikan kesempatan untuk menjual tanpa menarik uang “retribusi” didasarkan pada semangat nilai-nilai pesantren, ta'awun (prinsip tolong-menolong) dan maslahah (prinsip untuk kesejahteraan masyarakat). Meski begitu, fenomena perilaku ekonomi maslahat juga tampak dalam aktivitas warga dalam kegiatan keagamaan, seperti tahlilan, majelisan, dan semacamnya. Lembaga keagamaan ini juga merupakan sarana berkumpulnya warga desa yang berfungsi sebagai lembaga koperasi karena menjalankan sistem tanggung jawab ekonomi bersama dalam bentuk asuransi sosial dan dana bergulir. Oleh karenanya, dalam hal ini PNQ dapat dikatakan telah melaksanakan *wider mandate* pesantren di bidang ekonomi. Hal ini tentu menjadi penopang tercapainya tujuan syariat agama Islam (*maqashid al-shari'at*). Pengembangan usaha ekonomi di PNQ sejalan dengan *maqashid al-shari'at* di bidang pemeliharaan dan pengembangan harta-ekonomi (*hifdlul mal*).

F. Referensi

- Adhim, Fauzan. "Ekosistem Pesantrenpreneur Berbasis Pengembangan Potensi Lokal." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 19.2 (2021): 127-140.
- Adhim, Fauzan. *Arah Baru Manajemen Pondok Pesantren*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Ahmady, Noor. *Pesantren Dan Kewirausahaan: Peran Pesantren Sidogiri Pasuruan Dalam Mencetak Wirausaha Muda Mandiri*. Penelitian Individu, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Alhifni, A. et., al., "Waqf an instrument of community empowerment in Islamic Boarding School DaarutTauhiid in Indonesia". *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 13, No. 2 (2017): 76–88.
- Aminuddin, Luthfi Hadi, and Isnatin Ulfah. *SPIRIT NAHDLATUT TUJJAR: Gerakan Sosial NU Membangun Ekonomi Syari'ah*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.
- Arifin, Ah. Ali. "Peran Pesantren dalam Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat", dalam *El-Ijtima': Media Komunikasi Pengembangan Masyarakat Madani*. Surabaya: LPM-IAIN Sunan Ampel, 2004.
- Auda, Jasser. "Maqasid al-Shari'ah: an introductory Guide." *Herndon: International Institute of Islamic Thought*, (IIIT) (2008).
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. United Kingdom: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Azra, Azyumardi, Dina Afrianty, and Robert W. Hefner. 'Pesantren and madrasa: Muslim schools and national ideals in Indonesia', in Robert W. Hefner and Muhammad Qasim Zaman (eds). *Schooling Islam: The culture and politics of modern Muslim education*, (2007): 172–198. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Azra, Azyumardi. *Esei-Esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Bawani, Imam. *Pesantren Buruh Pabrik*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Bruinessen, Martin van. 'Shari'a court, tarekat and pesantren: Religious institutions in the Banten Sultanate', *Archipel 50: Banten Histoire d'une Region* (1995): 165–199.
- Bruinessen, Martin van. 'Traditionalist and Islamist pesantrens in contemporary Indonesia', in Farish A. Noor, Yoginder Sikand, and Martin van Bruinessen (eds). *The madrasa in Asia: Political activism and transnational linkages*. (2008) pp. 217–245. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Budiwiranto, Bambang. "Pesantren and participatory development: the case of the Pesantren Maslakul Huda of Kajen, Pati, Central Java." *Journal of Indonesian Islam* 3.2 (2009): 267-296.
- Buresh, Scott Allen. *Pesantren-based development: Islam, education, and economic development in Indonesia*. University of Virginia, 2002.
- Departemen Agama RI. *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*. Jakarta: Depag RI, 2000.
- Dokumen Profil Pondok Pesantren Nurul Qornain, Belum Publikasi.
- Fauroni, R. Lukman, and Mujahid Quraisy. "Pesantren Agility in Community Economic Development." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10.2 (2019): 155-168.
- Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Geertz, Clifford. "The Javanese Kijaji: The changing role of a cultural broker." *Comparative Studies in Society and History* 2.2 (1960): 228-24.
- Hadi, Syamsul. "The Economy of Wellbeing in Beji: Pesantren and Entrepreneurship in Village Community." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 4.1 (2019): 94-102.

- Hadiryandono, Muhammad Nafik. "Sosial Ekonomi Pondok Pesantren Perspektif Sejarah." *Mozaik Humaniora* 18.2 (2018): 189-204.
- Halim, Abd. *Manajemen pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Herdiansyah, Herdis, Trisasono Jokopitoyo, and Ahmad Munir. "Environmental awareness to realizing green Islamic boarding school (eco-pesantren) in Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 30. No. 1. IOP Publishing, 2016.
- Hilmy, Masdar. "Kepemimpinan modern berbasis karakter pesantren." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 7.2 (2019): 89.
- Hilmy, Masdar. "Towards a "Wider Mandate" of Pesantren: In Search For A New Nomenclature Of Political Role Of Pesantren In An Era Of Democracy." *Millah: jurnal studi agama* 11.1 (2011): 51-73.
- Hudaefi, Fahmi Ali, and Neni Heryani. "The practice of local economic development and Maqāsid al-Sharī'ah: Evidence from a Pesantren in West Java, Indonesia." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* (2019): 625-42.
- Hussin, Sufean, Mustari Mohamad, and Anahita Ghanad. "Education for emancipation and sustainability: the roles of Pesantrens in societal development in Java, Indonesia." *MOJEM: Malaysian Online Journal of Educational Management* 5.3 (2017): 1-18.
- Ibn 'Ashur, Muhammad ibn Thahir. *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- Indra, Hasbi. "Pesantren and Entrepreneurship Education." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 17.2 (2019).
- Isbah, M. Falikul. *Examining the Socio-Economic Role of Islamic Boarding Schools (Pesantren) in Indonesia*. Doctoral Dissertation, School of Humanities and Social Sciences University of New South Wales, Canberra, 2016.
- Kemenag, "Menag Ungkap Strategi Ungkit Kemandirian Pesantren", dalam <https://kemenag.go.id/read/menag-ungkap-strategi-ungkit-kemandirian-pesantren>, diakses 30 Januari 2022.
- Koran SINDO, "Dana Abadi Dorong Peran Kekinian Pesantren" dalam <https://nasional.sindonews.com/read/548276/15/dana-abadi-dorong-peran-kekinian-pesantren-1632323356>, (23 September 2021), diakses 30 Januari 2022.
- Kurniawan, Asep. "Manajemen Kerjasama Pondok Pesantren Alam Internasional Saung Balong Al-Barokah dengan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi dan Pendidikan." *Quality* 2.1 (2014): 21-55.
- Lazuardi, Lazuardi, et al. "Education Orientation of Pesantren Muhammadiyah in North Sumatra." *International Journal of Humanities and Social Science Invention* 6.7 (2017): 7-14.
- Ma'arif, Syamsul. "Pola Hubungan Patron-Client Kiai dan Santri di Pesantren." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 15.02 (2010): 273-296.
- Mahzumi, Fikri. "Nahdlatul Tujjar, Menyongsong NU-Kapital". *Majalah al-Fikrah* (2017). *MajalahAula NU*, No.05 Tahun XXIX. Surabaya: PWNNU Jawa Timur, 2007.
- Manfred, Ziemek. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1986.
- Masruroh N. dan Umiarso. *Modernisasi Pendidikan Islam Ala Azyumardi Azra*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Murtadho, M. "Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi", dalam www.balitbangdiklat.kemenag.go.id, diakses pada 19 September 2020.
- Mustari, Muhamad, and M. Taufiq Rahman. *Ekonomi Pesantren: Manajemen Pesantren dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Bekasi: Lintang Publishing, 2012.
- Muttaqin, Imron. "Types and Characteristics of Kyai Leadership Within Pesantren." *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan* 20.1 (2020): 165-174.

- Nafis, Muhammad Muntahibun. *Pesantren pluralis: peran pesantren ngalah dalam mengembangkan nilai-nilai pluralisme di tengah masyarakat yang multikultural*. Yogyakarta: Insan Madani, 2017.
- Nizam, I. *A Proposed Maqasid Al-Shari'ah Based Measurement of Socioeconomic Prosperity: A Composite Index for OIC Member Countries*, International Islamic University of Malaya, Kuantan, 2017.
- Nur, Bella Suci, and Achsanida Hendratmi. "Pengembangan Layanan Keuangan Digital pada Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Kasus Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7.3 (2020): 532-543.
- Oepen, Manfred (ed). *Dinamika Pesantren: Dampak Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*. Surabaya: Hikmah, n.d.
- Oladapo, Ibrahim Abiodun, and Asmak Ab Rahman. "Maqasid Shari'ah: the drive for an inclusive human development policy." *Jurnal Syariah* 24.2 (2017).
- Opop Jatim, "Pemprov Jatim dan OPOP Bersinergi Wujudkan Penguatan Ekonomi Berbasis Pesantren", dalam <https://opop.jatimprov.go.id/detail/12/pemprov-jatim-dan-opop-bersinergi-wujudkan-penguatan-ekonomi-berbasis-pesantren>, diakses 30 Januari 2022.
- Pohl, Florian. 'Islamic education and civil society: Reflections on the *pesantren* tradition in contemporary Indonesia'. *Comparative Education Review* 50–3 (2006): 389–409.
- Prasetyawan, Arian Agung, and Asep Maulana Rohimat. "Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren dan Social Entrepreneurship." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 11.2 (2019): 163-180.
- Pribadi, Yanwar. "Pesantren Pluralis: Peran Pesantren Ngalah dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Pluralisme di Tengah Masyarakat yang Multikultural, by M. Muntahibun Nafis." *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 174.2-3 (2018): 333-337.
- Qomar, Mujammil. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ricklefs, Merle Calvin. *Polarising Javanese society: Islamic and other visions, c. 1830–1930*. Leiden: KITLV Press, 2007.
- Ridwan, Auliya. "The dynamics of pesantren leadership from the dutch ethical policy to the reformation periods." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 15.02 (2020): 365-400.
- Rofiq, et.al. *Pemberdayaan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Shatibi (Al), Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Shatibi (Al). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Juz II. Kairo: Mustafa Muhammad, n.d.
- Sholikhah, Zumrotus. *Edupreneurship dalam mengembangkan karakter kemandirian santri: studi multikasus pondok pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo dan pondok pesantren Mambaus Sholihin Gresik*. Master thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Sila, M. Adlin. "BANK SYARIAH SEBAGAI BANK BAGI HASIL." *Dialog* 32.1 (2009): 30-51.
- Sirry, Mun'im. 'The public expression of traditional Islam: The *pesantren* and civil society in post-Suharto Indonesia'. *The Muslim World* 100–1 (2010): 60–77.
- Srimulyani, Eka. 'Muslim women and education in Indonesia: The *pondok pesantren* experience'. *Asia Pacific Journal of Education* 27–1 Muslim education: Challenges, opportunities and beyond (2007): 85–99.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- STISNQ. "Sejarah STIS Nurul Qarnain Jember" dalam <https://stisnq.ac.id/sejarah-stis-nurul-qarnain-jember/>, diakses 30 Januari 2022.
- Sultho dan Khusnur Ridho. *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: Lektang pressindo, 2006.

Suwito, N. S. "Model Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2008): 63-85.

Warsah, Idi. "Entrepreneurship Education in Pesantren: Strategies to Drive Students' Interest in Entrepreneurship." *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan* 18.2 (2020): 211-230.

Yahya, Muchtar dan Fatchur Rahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Hasil Wawancara:

Informasi dari Arifin (Warga Masyarakat) sekitar Pesantren Nurul Qornain.

Informasi dari H. Imam Syafi'i (Pengasuh) Pesantren Nurul Qornain.

Informasi dari KH. Yazid Karimullah (Pengasuh Utama) Pesantren Nurul Qornain.

Informasi Ibu Ye (Warga Masyarakat) sekitar Pesantren Nurul Qornain.

Infromasi dari Ridwan (Warga Masyarakat) sekitar Pesantren Nurul Qornain.

Silahkan merujuk pada naskah versi Bahasa Inggris untuk Pengutipan